

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesulitan keuangan merupakan satu salah masalah yang sering dihadapi oleh manusia. Hal ini dapat disebabkan dari kesalahan dalam pengelolaan keuangan, pengeloalaan kredit dan kurangnya perencanaan keuangan, serta pengetahuan terhadap melek keuangan yang belum maksimal. Dengan begitu setiap individu harus memiliki suatu pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber keuangan pribadinya secara efektif demi kesejahteraan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan baik. Semakin meningkatnya pemahaman akan literasi keuangan mengakibatkan semakin banyaknya masyarakat yang menabung dan berinvestasi sehingga semakin tinggi pula potensi transaksi keuangan yang terjadi. Hal tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta dapat menciptakan pemerataan pendapatan.

Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang dilakukan tahun 2013 (www.sikapiuangmu.ojk.go.id), bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat

Indonesia yang tergolong *well literate* hanya sebesar 21,8%, *sufficient literate* sebesar 75,69%, *less literate* sebesar 2,06% dan *notliterate* sebesar 0,41%. Data tersebut disajikan pada tabel 1.1, sebagai berikut:

TABEL 1.1
Indeks Literasi Keuangan Penduduk Indonesia (2013)

Indeks Literasi Keuangan	%
<i>Well Literate</i>	21,8
<i>Sufficient Literate</i>	75,69
<i>Less Literate</i>	2,06
<i>Not Literate</i>	0,41
Total	100

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2013

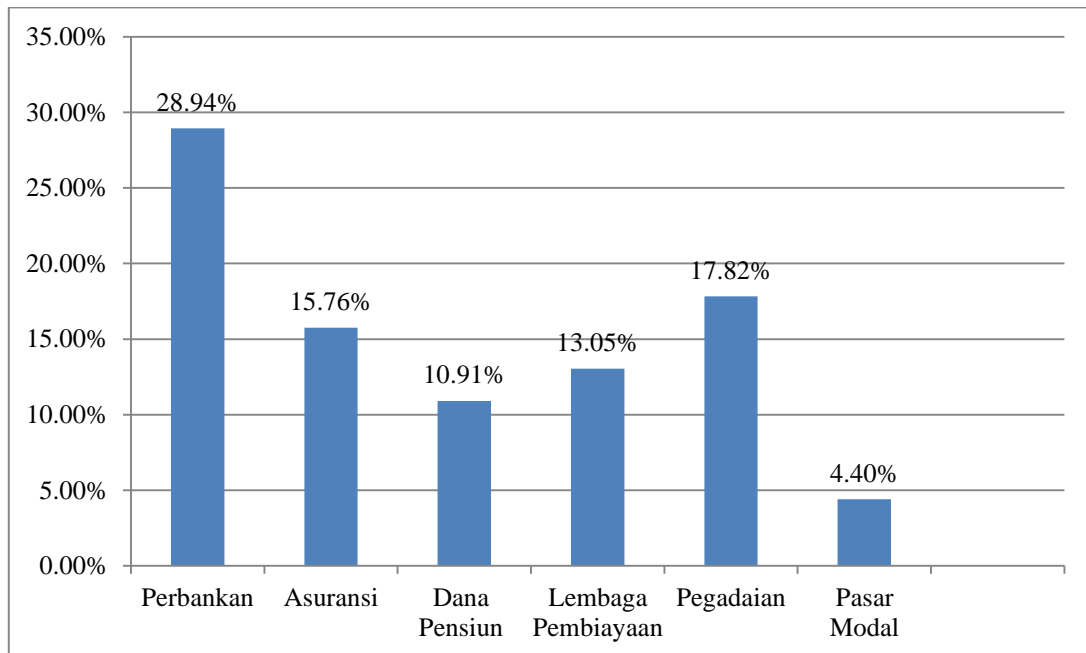
Minat masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa keuangan lebih tinggi dibandingkan dengan pengetahuan terhadap produk dan jasa keuangan tersebut. Hal ini tidak ideal, karena seharusnya masyarakat harus memahami terlebih dahulu mengenai resiko suatu produk sebelum menggunakannya. Dapat dibuktikan berdasarkan data yang bersumber dari Otoritas Jasa keuangan dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

TABEL 1.2
Utilitas Produk dan Jasa Keuangan Penduduk Indonesia, 2016

Utilitas Produk dan Jasa Keuangan	%
Punya/ pernah menggunakan produk dan jasa keuangan	67,82
Tidak punya/ tidak pernah menggunakan produk dan jasa keuangan	32,18
Total	100

Sumber: Laporan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan, 2016

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan berbagai program dalam pencapaian akses pada industri keuangan melalui peluncuran Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLKI). SNLKI menegaskan bahwa OJK bersama pemerintah melaksanakan program tersebut dengan tujuan untuk memperluas akses masyarakat pada industri keuangan yaitu salah satunya melalui edukasi finansial. Edukasi finansial adalah proses panjang yang memacu individu untuk memiliki rencana keuangan di masa depan demi mencapai kesejahteraan sesuai dengan pola dan gaya hidup yang mereka jalani (Mendari dan Kewal, 2013: 2).



Sumber: Laporan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan, 2016

GAMBAR 1.1

Diagram Tingkat Literasi Keuangan Penduduk Indonesia (Sektoral)

Diagram diatas menunjukkan presentase indeks keuangan berdasarkan tingkat sektoral di Indonesia yang diakses melalui website OJK. Indeks literasi keuangan tertinggi sebesar 28,94 persen pada sektor perbankan, diikuti oleh sektor pegadaian sebesar 17,82 persen, kemudian sektor peransurashian sebesar 15,76 persen, lembaga pembiayaan sebesar 13,05 persen dan dana pensiun sebesar 10,91 persen serta indeks terendah yaitu sektor pasar modal sebesar 4,40 persen.

Indah Fatmawati (2015) mengatakan bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami

kerugian, akibatnya terjadi penurunan kondisi perekonomian, inflasi atau berkembangnya perilaku konsumtif yang cenderung boros. Banyak masyarakat yang memanfaatkan kredit rumah dan kartu kredit tetapi pengetahuannya minim sehingga tidak sedikit yang mengalami kerugian atau sering terjadi perbedaan perhitungan antara konsumen dan bank.

Indonesia pernah mengalami krisis moneter yang cukup besar pada tahun 1998, dan sektor yang mampu bertahan pada saat itu adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Krisis ini menjadikan daya tahan UMKM tersebut sebagai asset yang penting bagi keberlangsungan perekonomian negara baik pada tahun-tahun krisis maupun pada saat ini.

Survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016, menyatakan bahwa UMKM dinilai sebagai sektor terpenting pada perekonomian nasional karena kontribusinya mencapai 58,92% pada PDB (Produk Domestik Bruto). Oleh karena itu melalui OJK, pemerintah terus meningkatkan edukasi tentang literasi keuangan bagi seluruh elemen khususnya UMKM. Edukasi yang dilakukan pemerintah melalui OJK berdasarkan UU OJK tentang Edukasi dan Perlindungan Konsumen pasal 28, 29 dan 30. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan kebutuhan mendasar. Kepercayaan konsumen merupakan prasyarat dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan dalam jangka panjang. Edukasi tersebut juga sesuai dengan Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK) Indonesia yang menargetkan *well literate society* pada tahun 2017 ini.

TABEL 1.3
Tingkat Literasi Keuangan di Wilayah Sumatera

Wilayah	Indeks (%)
Sumatera Utara	32,36
Sumatera Barat	27,27
Sumatera Selatan	31,27
Bengkulu	27,64
Lampung	26,91

Sumber: Laporan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016

Berdasarkan tabel 1.3, indeks literasi keuangan tertinggi yaitu Sumatera Utara sebesar 32,36%. Sedangkan posisi terendah terdapat di wilayah Lampung yang hanya sebesar 26,91%. Hal tersebut menjadikan Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah khususnya di Kota Bandar Lampung yang menjadi obyek OJK dalam pengedukasian literasi keuangan. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan dan informasi terkait literasi keuangan kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu apa itu perbankan, produk-produknya dan hal-hal yang berkaitan dengan perbankan.

Secara geografis, Kota Bandar Lampung merupakan wilayah yang sangat strategis karena berada di pintu gerbang jalur perlintasan ekonomi antar pulau Sumatera dan pulau Jawa sehingga menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai sentra perdagangan nasional yang memiliki mobilitas yang tinggi. Bandar Lampung adalah salah satu kawasan perdagangan di Pulau Sumatera

yang berpotensi menjadi pusat perdagangan (*Trade Centre*) berskala internasional.

Kota Bandar Lampung mempunyai banyak industri yang berkembang di masyarakat baik itu industri berskala kecil, menengah maupun industri berskala besar karena Bandar Lampung merupakan daerah industri dan perdagangan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Data yang diperoleh dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung jumlah UKM di Kota Bandar Lampung yang berada di 20 kecamatan seluruhnya mencapai 39.960 unit, yang terdiri dari 19.558 usaha mikro, 15.091 unit usaha kecil dan 5.311 unit usaha menengah.

Perkembangan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bandar Lampung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan walaupun peningkatannya tidak mencapai atau lebih dari 10%. Menurut Diskoperindag, kategori UMKM terdiri dari perdagangan, jasa dan industri. Masing-masing level usaha memiliki keragaman yang berbeda. Pada usaha mikro kategori bidang usaha yang paling banyak bergerak di bidang perdagangan, sedangkan pada level usaha kecil menengah paling banyak berada pada jenis bidang industri. Salah satu misi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung adalah:

“Mewujudkan Usaha Mikro Kecil Menengah agar mempunyai daya saing tinggi dan memiliki Usaha Unggulan yang Kompetitif”

Menindaklanjuti misi tersebut, pemerintah daerah sangat memperhatikan UMKM di Kota Bandar Lampung. Pengembangan UMKM di Kota Bandar Lampung yang telah dilakukan antara dengan memberikan fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan pembiayaan baik penyediaan dana oleh pemerintah (perbankan dan atau lembaga keuangan non bank) untuk memperkuat permodalan maupun pemberian jaminan pinjaman usaha oleh LPK (Lembaga Penjamin Kredit) sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis tingkat literasi keuangan pada pelaku sektor UMKM di Kota Bandar Lampung dengan judul *“Analisis Tingkat Literasi Keuangan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bandar Lampung”*

B. Batasan Masalah Penelitian

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan luasnya ruang lingkup penelitian, maka peneliti memberikan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Peneliti membatasi penelitian tentang literasi keuangan pelaku

UMKM Kota Bandar Lampung pada lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan mikro.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, didapat beberapa rumusan masalah mengenai tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung:

1. Bagaimana tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung?
2. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung berdasarkan jenis kelamin?
3. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung berdasarkan lama usaha?
4. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung berdasarkan pendidikan?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat literasi keuangan pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung berdasarkan jenis kelamin.
3. Untuk mengetahui perbedaan tingkat literasi pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung berdasarkan lama usaha.
4. Untuk mengetahui perbedaan tingkat literasi keuangan pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung berdasarkan pendidikan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pelaku UMKM, sebagai solusi untuk meningkatkan pemahaman tentang keuangan
2. Pemerintah dan perbankan, sebagai referensi agar dapat membantu penyediaan modal bagi UMKM serta untuk merumuskan strategi dalam meningkatkan pemahaman literasi keuangan kepada pelaku UMKM
3. Peneliti, sebagai referensi atau pemanding untuk penelitian berikutnya.

